



Laporan Kinerja Triwulan I 2026

**STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TERNATE
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (LKj SPPMHKP Ternate) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SPPMHKP Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SPPMHKP Ternate Tahun 2026. Secara umum, pada Triwulan I Tahun 2026 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran dilaksanakan kegiatannya pada triwulan II, III dan IV dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SPPMHKP Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SPPMHKP Ternate dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Ternate, April 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Ternate

Arsal, S.St.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1. CAPAIAN KINERJA	7
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	8
2.3. REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SPPMHKP Ternate Tahun 2026	5
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan I Tahun 2026	7
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 2 Pada Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 3 Pada Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 03.7 Pada Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 03.9 Pada Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 2.6	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 2.7	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaaku	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SPPMHKP Ternate pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Sebesar 114,57%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SPPMHKP Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

- A. Dari 11 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2026, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 5 Target IKU pada Triwulan 1 yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:
1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Stasiun PPMHKP Ternate (persen)
 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)
 3. Persentase Implementasi Metode Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)
 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)
 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)
 6. Nilai Indeks kepuasan masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)

Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Ternate Triwulan I 2026 baru mencapai **Rp. 731.228.500,-** atau **28,64%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.553.076.000,-**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (Stasiun PPMHKP Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (SPPMHKP Ternate) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu SPPMHKP Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan ini kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SPPMHKP Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi dan target kinerja SPPMHKP Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali untuk peningkatan kinerja SPPMHKP Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

SPPMHKP Ternate sebagai salah satu UPT Badan Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab sebagai *quality assurance* yaitu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan baik dari hulu hingga hilir. Salah satu tugasnya adalah melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, tangkapan maupun penanganan dan pengolahan.

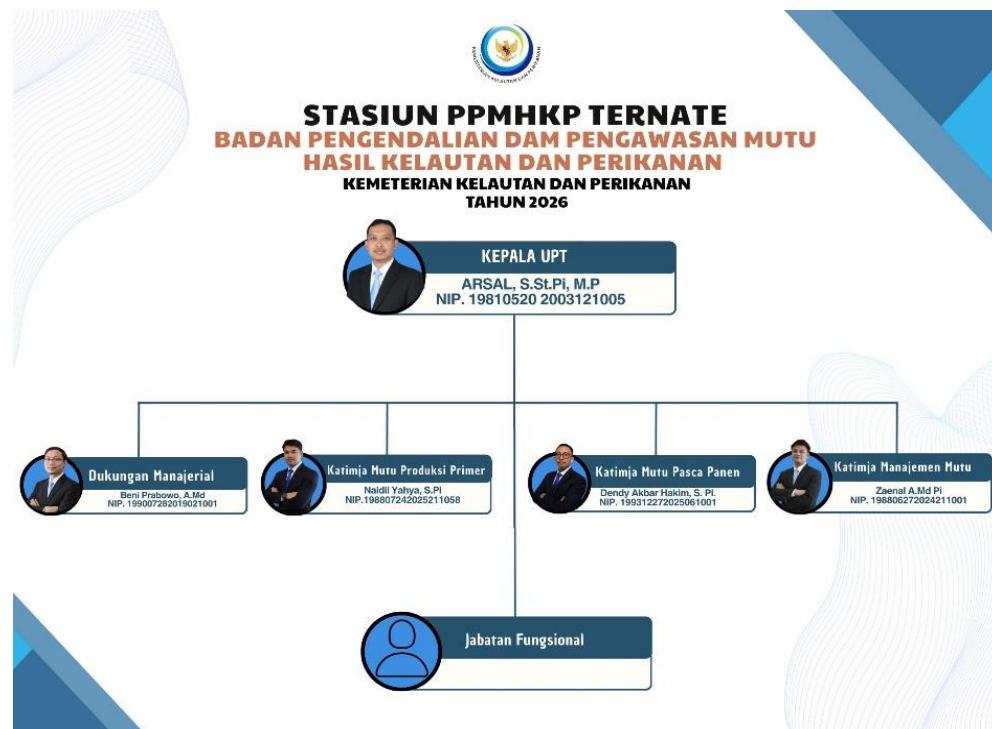
Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit pembudidaya ikan, unit penangkapan ikan, pakan ikan, obat ikan, unit penanganan dan pengolahan ikan hingga distribusi hasil perikanan. Untuk Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan surveilan dan monitoring dalam rangka memastikan konsistensi penerapan sistem di unit tersebut

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh inspektur mutu BPPMHKP. Output dari penjaminan tersebut berupa sertifikat pengendalian di unit penanganan dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB kapal), Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), *Hazard Analysis and Crytical Control Point* (HACCP) dan Sertifkaat Mutu Hasiol Kelautan dan Perikanan (SMHKP).

Selain itu BPPMHKP juga melaksanakan tugas kegiatan monitoring pencemaran residu dan bahan berbahaya di perairan umum, monitoring kesegaran ikan di Pelabuhan perikanan / tempat pendaratan ikan dan pasar ikan, penjaminan mutu (*quality assurance*) di Lokasi Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan Maju / Modern (Kalaju/Kalamo), Kmapung Nelayan Merah Putih (KNMP), tracebility produk hasil tangkap dan hasil budidaya di unit usaha.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SPPMHKP Ternate dibantu Oleh Ketua Tim Kerja (Katimja) dan 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sebanyak 3 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 2 orang, tenaga administrasi sebanyak 5 orang serta dibantu oleh petugas PJLP sebanyak 3 orang dan Petugas Outsoercing sebanyak 3 orang. Adapun struktur organisasi SPPMHKP Ternate sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SPPMHKP Ternate Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
SK 2	Terselenggaranya Penegndalian Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	3	Persentase Implenetasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPPMHKP Ternate (%)	71
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	3.5

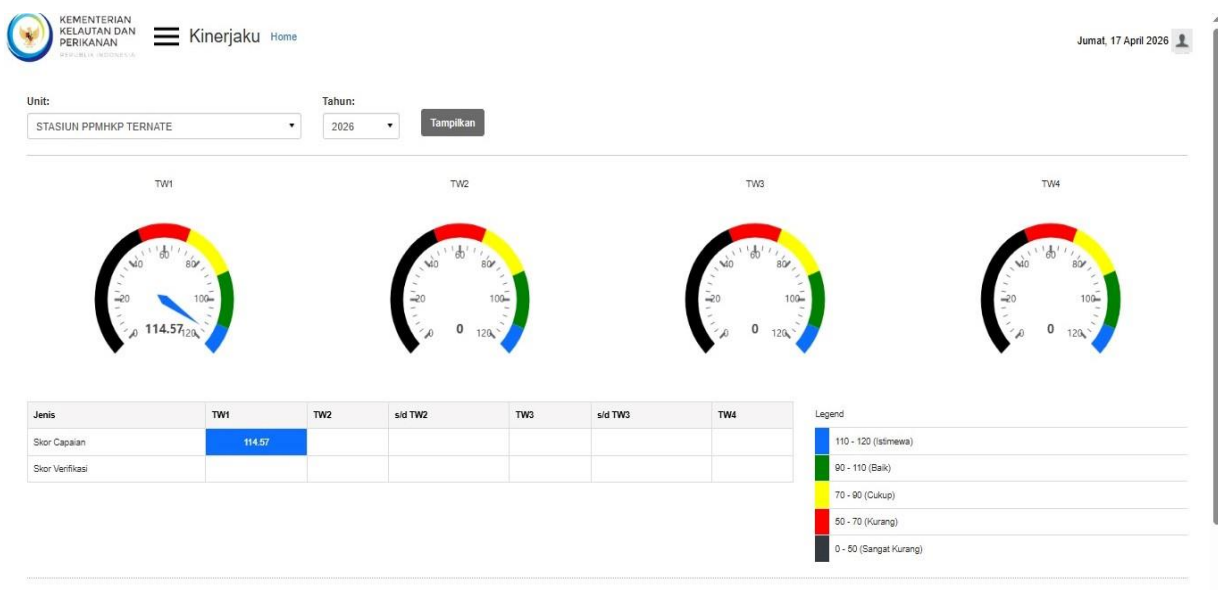
BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (SPPMHKP Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SPPMHKP Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SPPMHKP Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SPPMHKP Ternate pada Triwulan I 2026 sudah sangat baik / istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 114,57% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 114,57. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan I Tahun 2026 ini belum mencapai target semua Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan I tahun 2026 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SPPMHKP Ternate Triwulan I Tahun 2026

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SPPMHKP Ternate pada Triwulan I Tahun 2026 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72	90,28	120
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72	100	120
SK 2	Terselenggaranya Penegndalian Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	3	Persentase Implenetasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPPMHKP Ternate (%)	71	76	107,4
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5	-	-
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	82,5	-	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	86	100	116,28
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1	-	-
		9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75	100	120
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77	-	-
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	3.5	3,98	113,71

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail sesuai indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2025 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

IKS.01.1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator penting dalam menjamin bahwa aktivitas pembenihan, pembesaran, maupun penanganan hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal), dan Cara Pembenihan yang baik (CPIB). Pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor produksi primer menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian 90,28%. Pada realisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sudah mencapai 65%. Meskipun sudah mencapai target, angka 65% masih menunjukkan bahwa terdapat sekitar 35% pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan standar Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Pada capaian Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal sebesar 65%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal sudah berjalan cukup efektif. Stasiun PPMHKP Ternate terus berupaya meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal dengan melakukan sosialisasi Tentang Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal. Stasiun PPMHKP Ternate juga terus berkoordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk percepatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal.

Implikasinya, mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya, Pembenihan maupun penangkapan di wilayah Maluku Utara menjadi lebih terjamin, keberlanjutan usaha budidaya, pembenihan dan penangkapan meningkat, serta kepercayaan pasar terhadap produk perikanan budidaya semakin kuat, sehingga mendukung penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

Realisasi Kegiatan:

1. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) : 65 %
2. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas Kapal : 65%
3. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) : 65%

Capain Indikator:

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus berikut:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$
$$\%X = \frac{65+65+65+65+65}{5} \times 100\%$$
$$\%X = 65$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah

$$\%X = 65/72 \times 100\% = 90,28 \%$$

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.1.1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	72	72	90,28	120	120

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I sudah tercapai, sedangkan untuk target keseluruhan di 2026 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

IKS.01.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMMT/HACCP mengacu pada PermenKP No 51 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point. Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev

ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Standar ini meliputi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), *Codex Alimentarius*, dan standar perdagangan lainnya.

Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi, survailan dan Monev HACCP, Inspeksi dan surveilan SKP, SPDI.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun PPMHKP Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Realisasi Kegiatan :

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 7 SKHS

$$\%x = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

2. Rekomendasi : 4 dan SKP Terbit : 4

$$\%x = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator :

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SPPMHKP Ternate adalah:

$$\%X = \frac{A + B}{Xn} \times 100\%$$
$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\% = 100$$

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	72	72	100	120	120

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I sudah tercapai, sedangkan untuk target keseluruhan di 2026 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

IKS.2.1 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate

Stasiun PPMHKP Ternate secara aktif melaksanakan kegiatan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi, sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium dan lembaga inspeksi telah memenuhi persyaratan mutu yang ketat serta mampu memberikan hasil pengujian dan inspeksi yang valid, konsisten, dan dapat diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Evaluasi pada laboratorium pengujian mengacu pada ISO/IEC 17025, yang mencakup ruang lingkup, acuan normatif, persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen. Standar ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan formal (akreditasi) atas kompetensi laboratorium dalam menjalankan pengujian dan kalibrasi. Pemenuhan standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap validitas data hasil pengujian, yang menjadi elemen kunci dalam mendukung kegiatan ekspor perikanan dan memperkuat daya saing global.

Sementara itu, evaluasi terhadap lembaga inspeksi dilakukan berdasarkan ISO/IEC 17020, yang bertujuan memastikan proses inspeksi dilakukan secara konsisten, objektif, dan akurat. Penilaian ini melingkupi persyaratan umum, struktural, sumber daya, proses, hingga sistem manajemen yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hasil inspeksi. Nilai penerapan sistem manajemen mutu untuk laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi dinyatakan dalam bentuk

persentase, yang mencerminkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang ditetapkan dalam standar. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium atau lembaga inspeksi telah mencapai atau mendekati pemenuhan standar secara optimal, sementara skor rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu. Melalui kegiatan ini, Stasiun PPMHKP Ternate tidak hanya memastikan bahwa laboratorium penguji dan lembaga inspeksi di wilayahnya memenuhi standar internasional, tetapi juga turut memperkuat reputasi produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan pendekatan ini, Stasiun PPMHKP Ternate berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekspor, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Target Kegiatan:

- Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium = 71
- Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi = 71

Realisasi Kegiatan:

- Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium
- Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi = 76

Capain Indikaator:

Presentase Pengukuran capaian indicator menggunakan rumus berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{2} = 100\%$$

Jadi Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate yakni:

$$\%X = \frac{78}{2} \times 100\% = 78\%$$

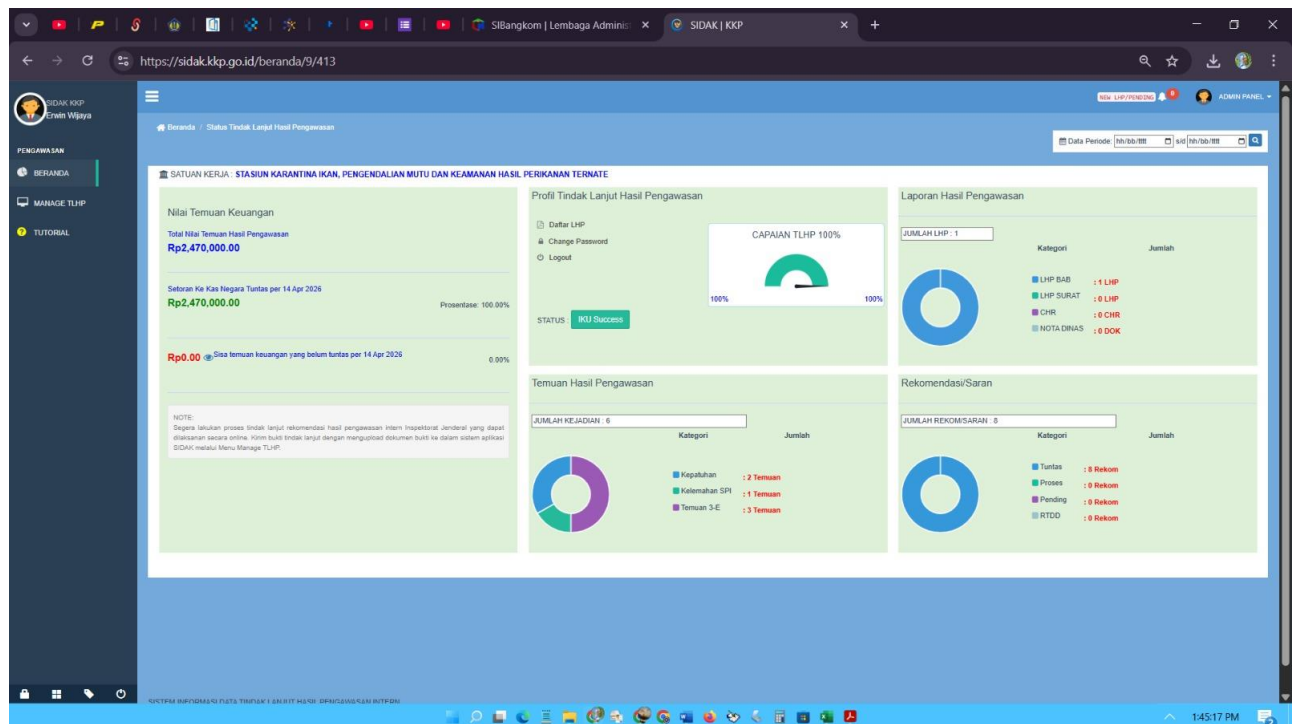
Tabel 2.4. Target dan Realisasi IKS.2.1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	72	72	100	120	120

IKS.3.7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP (Persen)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate terealisasi 100 % dari target 86%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun PPMHKP Ternate untuk Triwulan I tahun 2026 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang dilakukan

oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.



Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.3.7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate	86	86	100	116,28	116,28

IKS.3.9 Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)

Nilai kinerja anggaran (NKA) BPPMHKP adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BPPMHKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan

yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BPPMHKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggarandiantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BPPMHKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker.
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat.
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP.
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu.

- d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya.
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD).
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontraktermasuk addendum kontrak ke KPPN.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 - c. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
 - d. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
 - e. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.
11. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja;
12. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 202

Target indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate pada 2026 adalah 71,75 dan realisasi TW I adalah 100 (kategori A/Memuaskan).

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IKS.3.9 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate	71,75	71,75	100	120	120

IKS.3.11. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPT Lingkup BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2026 adalah 3,5 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 9 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Jadi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate sebagai berikut :

$$IKM = \frac{9 \times 3,98}{9} = \frac{35,83}{9} = 3,98$$

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator ini 3,98 dari target TW I 3,5 atau mencapai 113,71 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 88 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun PPMHKP Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IKS.03.11 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Triwulan I			
		Target	Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	3,5	3,5	3,98	113,71	113,71

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SPPMHKP Ternate pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.649767/2026 tgl 01 Desember 2025 sebesar Rp. 2.617.361.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.484.986.000,- dan PNPB sebesar Rp. 132.375.000 Realisasi penyerapan anggaran SPPMHKP Ternate pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 533,680,732 atau sebesar 36%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SPPMHKP Ternate T.A 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,456,766,000	710,522,300	28,92
2	Pengendalian dan Pengawasan Mutu	50,510,000	10,766,200	21,56
3	Manajemen Mutu	45,000,000	10,000,000	21,83
TOTAL		2,617,361,000	731,288,500	28,64

Tabel 2.9. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Belanja Pegawai	1,627,220,000	365,259,028	22,45
2	Belanja Barang	990,141,000	366,029,472	36,97
3	Belanja Modal	0	0	0,00
TOTAL		2.617.361.000	731,288,500	28,64

BAB III

PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2026, SPPMHKP Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I disebabkan pencapaian targetnya ada yang dilaksanakan di Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan I adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait hasil capaian dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai target kinerja.
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan I.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SPPMHKP Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Lampiran Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SPPMHKP Ternate

